

PARADOKS TEORI PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT MOBILITAS SOSIAL DALAM KETIMPANGAN PENDIDIKAN DAN TANTANGAN KERJA GENERASI Z DI INDONESIA

Dayinta Hutabarat¹, Christian Samuel Pangaribuan²

ARTICLE INFO

Article history:

Received : April 2025
Revised : April 2025
Accepted : April 2025
Available online

Korespondensi: Email:

dayinta123@icloud.com

christiansamuel2102@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas

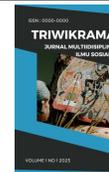
Abstract

Education is often positioned as a central pillar of social mobility in modern societies, with the expectation that through education, individuals from diverse socio-economic backgrounds can improve their quality of life. However, in the Indonesian context, this expectation reveals several paradoxes. This study critically examines how educational inequality and the disconnection between education and the labor market affect Generation Z. Using a qualitative phenomenological approach and Marxian critical theory—particularly Pierre Bourdieu’s concept of social reproduction and Louis Althusser’s theory of the Ideological State Apparatus—this research finds that the Indonesian education system tends to reinforce existing class structures. Inequitable access to higher education, the dominance of bureaucratic values in the workplace, and the phenomenon of skills mismatch contribute to the high unemployment rate among university graduates and the misalignment between qualifications and job opportunities. Education is shown to emphasize formal credentials over practical competencies, while Generation Z demands flexible, meaningful, and digitally-driven work environments. This study concludes that education in Indonesia has not fulfilled its emancipatory promise as a tool for social mobility; instead, it serves as a mechanism of class reproduction that deepens social inequality. Therefore, a systemic transformation toward a more inclusive, relevant, and critically conscious education system is urgently needed.

Keywords: Education, Social Mobility, Generation Z, Marxian Theory, Social Inequality, Skill Mismatch.

Abstrak

Pendidikan kerap diposisikan sebagai pilar utama mobilitas sosial dalam masyarakat modern, dengan harapan bahwa melalui pendidikan, individu dari berbagai latar belakang sosial dapat meningkatkan taraf hidupnya. Namun, dalam konteks Indonesia, harapan tersebut menghadapi berbagai paradoks. Penelitian ini mengkaji secara kritis bagaimana ketimpangan pendidikan dan keterputusan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja berdampak pada Generasi Z. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dan kerangka teori kritis Marxisme, khususnya konsep reproduksi sosial oleh Pierre Bourdieu dan *Ideological State Apparatus* dari Louis Althusser, penelitian ini mengungkap bahwa sistem pendidikan Indonesia cenderung memperkuat struktur kelas sosial yang sudah ada. Ketimpangan akses pendidikan tinggi, dominasi nilai-nilai birokratis dalam dunia kerja, dan fenomena *mismatch* keterampilan menyebabkan banyak lulusan sarjana menganggur atau bekerja di sektor yang tidak sesuai kompetensinya. Pendidikan lebih menekankan sertifikasi formal daripada keterampilan nyata, sementara Generasi Z menuntut pekerjaan yang fleksibel, bermakna, dan adaptif terhadap era digital. Kajian ini menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya gagal sebagai alat



mobilitas sosial, tetapi juga menjadi sarana reproduksi kelas yang memperdalam ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan kritis terhadap struktur kekuasaan yang mendasarinya.

Kata kunci: Pendidikan, Mobilitas Sosial, Generasi Z, Teori Marxian, Ketimpangan Sosial, *Mismatch* Keterampilan.

PENDAHULUAN

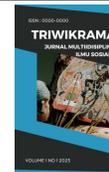
Latar belakang

Pendidikan secara normatif diposisikan sebagai pilar utama mobilitas sosial, sebuah mekanisme yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencapai status sosial yang lebih tinggi. Dalam kerangka teori fungsionalisme menurut Mesra (2023), pendidikan dianggap sebagai institusi *meritokratis* yang memberikan peluang setara bagi semua orang berdasarkan kemampuan dan usaha mereka. Di Indonesia, narasi ini telah lama menjadi landasan kebijakan pendidikan nasional, dengan harapan bahwa investasi dalam pendidikan akan menciptakan tenaga kerja terampil, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif. Namun, realitas menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu berfungsi sebagai penyeimbang seperti yang dijanjikan, melainkan sering kali memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada.

Ketimpangan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu tantangan mendasar yang menghambat fungsi pendidikan sebagai alat mobilitas sosial. Menurut Raharjo (2024) distribusi pendidikan berkualitas sangat tidak merata, dengan konsentrasi institusi pendidikan unggulan di wilayah urban, khususnya di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah tertinggal menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga pengajar, dan akses teknologi. Anak-anak dari keluarga kaya mendapatkan keuntungan dari sekolah swasta ternama, les privat, dan eksposur budaya yang mendukung prestasi akademik, sedangkan anak-anak dari keluarga miskin sering kali terjebak dalam sistem pendidikan yang kurang memadai. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan menuju perubahan sosial justru menjadi mekanisme reproduksi kelas, di mana privilese sosial-ekonomi awal menentukan peluang keberhasilan seseorang.

Akses terhadap pendidikan tinggi, yang dianggap sebagai jenjang strategis untuk mobilitas sosial, juga mencerminkan ketimpangan struktural. Biaya kuliah yang tinggi, keterbatasan beasiswa, dan sistem seleksi masuk yang kompetitif membuat pendidikan tinggi menjadi domain kelompok sosial-ekonomi atas. Program afirmatif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah belum mampu menutup kesenjangan ini secara signifikan, terutama karena kendala non-ekonomi seperti kurangnya informasi, hambatan kultural, dan keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal. Dengan demikian, pendidikan tinggi bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga soal modal sosial dan ekonomi, yang semakin memperlebar jurang antara kelompok masyarakat.

Keterputusan antara pendidikan dan dunia kerja menjadi masalah lain yang memperumit peran pendidikan sebagai alat mobilitas sosial, khususnya bagi Generasi Z (lahir 1997-2012). Banyak lulusan sarjana menghadapi pengangguran atau *underemployment*, bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka, seperti pengemudi ojek *online* atau pekerja ritel. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sarjana berkisar antara 5-7%, mencerminkan ketidakmampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja terdidik. Fenomena ini diperparah oleh *mismatch* keterampilan, di mana kurikulum pendidikan tinggi tidak selaras dengan kebutuhan industri, seperti keterampilan digital, analisis data, atau *soft skills*, sehingga lulusan dianggap kurang kompeten oleh pemberi kerja.



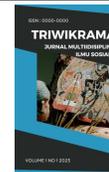
Generasi Z juga menghadapi tantangan unik akibat perubahan nilai kerja dan ekspektasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka mengutamakan pekerjaan yang fleksibel, bermakna, dan berbasis digital, serta menolak struktur kerja konvensional yang hierarkis dan kaku. Namun, dunia kerja di Indonesia masih didominasi oleh budaya birokratis dan pekerjaan formal yang terbatas, menciptakan disonansi antara harapan dan realitas. Fenomena ijazah tidak menjamin pekerjaan semakin memperkuat persepsi bahwa sistem pendidikan lebih bersifat simbolik, menghasilkan kredensial formal tanpa daya guna konkret, sehingga menimbulkan kekecewaan dan krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan.

Paradoks utama yang muncul dari dinamika ini adalah kontradiksi antara janji pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan kenyataan bahwa pendidikan justru sering memperkuat ketimpangan sosial. Dalam perspektif teori kritis, seperti yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu dan Louis Althusser, pendidikan berfungsi sebagai alat reproduksi kelas, melanggengkan dominasi kelompok atas melalui akses yang tidak merata dan kurikulum yang menekankan kepatuhan daripada kreativitas. Sistem pendidikan di Indonesia cenderung mengutamakan sertifikasi formal (ijazah, IPK) daripada keterampilan praktis, yang semakin menjauhkan lulusan dari kebutuhan pasar kerja modern. Akibatnya, pendidikan tidak hanya gagal memenuhi fungsi *emansipatoris*-nya, tetapi juga berkontribusi pada stagnasi sosial-ekonomi bagi kelompok marjinal.

Pemerintah, sebagai pengelola kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan, memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi paradoks ini, namun kebijakan yang ada sering kali tidak memadai. Menurut Muttaqin (2025) kurangnya reformasi kurikulum yang responsif terhadap industri, minimnya investasi pada pendidikan vokasi, dan ketimpangan alokasi sumber daya pendidikan antarwilayah menunjukkan kurangnya komitmen terhadap transformasi sistemik. Fokus pada indikator kuantitatif, seperti tingkat kelulusan, mengabaikan kebutuhan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan. Tanpa intervensi yang terarah, ketimpangan pendidikan dan keterputusan dengan dunia kerja akan terus memperlemah potensi Generasi Z, memperpanjang siklus ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan nasional yang inklusif. Oleh karena itu, kajian ini relevan untuk menggali akar masalah dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dayinta (2025) menjelaskan sistem yang seolah demokratis dan *meritokratis*, seperti pendidikan dan negara, pada kenyataannya dikendalikan oleh kelas dominan. Dalam kacamata Marxian, baik institusi pendidikan maupun negara berperan sebagai instrumen ideologis dan struktural untuk mempertahankan dominasi kapital dan kekuasaan elite. Dominasi ini tidak selalu tampak sebagai represi langsung, tetapi bekerja secara halus melalui nilai-nilai seperti prestasi akademik, sertifikasi, demokrasi prosedural, dan hukum formal. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya membongkar ilusi netralitas institusi. Pendidikan tidak netral, karena lebih menguntungkan yang punya modal awal.

Dengan mengungkap dampak psikososial ketimpangan pendidikan, seperti krisis kepercayaan dan apatisme di kalangan Generasi Z, penelitian ini mendorong kesadaran kolektif tentang perlunya transformasi sistem pendidikan yang lebih inklusif. Hal ini dapat memotivasi gerakan sosial untuk menuntut keadilan pendidikan dan peluang kerja yang lebih merata. Banyak penelitian menggunakan pendekatan fungsionalis atau neoliberal untuk menganalisis pendidikan sebagai alat mobilitas sosial, tetapi jarang yang mengadopsi perspektif Marxisme untuk mengkritik pendidikan sebagai alat reproduksi kelas. Penelitian ini mengisi celah dengan menerapkan konsep Bourdieu dan Althusser untuk mengungkap bagaimana sistem pendidikan di Indonesia mempertahankan dominasi kelas atas melalui struktur kurikulum dan seleksi berbasis kredensial.



Rumusan masalah

1. Bagaimana nilai-nilai kerja Generasi Z, seperti preferensi terhadap kerja fleksibel dan bermakna, bertentangan dengan struktur kerja konvensional di Indonesia, dan apa implikasinya terhadap adaptasi mereka di pasar kerja?
2. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai alat reproduksi kelas sosial, dan mengapa sistem ini lebih mengutamakan kredensial formal daripada keterampilan praktis?

TINJAUAN PUSTAKA

Mobilitas Sosial

Teori mobilitas sosial dalam perspektif fungsionalisme dalam penelitian Hidir (2024), seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons serta Davis dan Moore, melihat pendidikan sebagai instrumen utama untuk mencapai mobilitas sosial. Mobilitas sosial sendiri dipahami sebagai perpindahan individu dalam struktur sosial berdasarkan pencapaian dan kemampuan. Kaum fungsionalis percaya bahwa sistem stratifikasi sosial bersifat fungsional dan adil karena memungkinkan individu yang paling kompeten untuk menduduki posisi penting melalui proses seleksi berbasis prestasi.

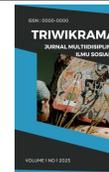
Talcott Parsons menekankan bahwa pendidikan mentransmisikan nilai-nilai universal seperti kerja keras dan pencapaian, yang menjadi dasar status sosial seseorang dalam masyarakat modern. Sementara itu, Davis dan Moore berpendapat bahwa stratifikasi diperlukan untuk memastikan posisi penting diisi oleh individu terbaik, dan pendidikan menjadi mekanisme seleksi yang sah untuk menilai kelayakan individu melalui proses yang objektif. Dengan kata lain, pendidikan berperan sebagai jembatan antara individu dan posisi sosial yang tinggi dalam sistem *meritokrasi*.

Reproduksi Sosial

Teori reproduksi sosial dalam buku yang ditulis oleh Deni (2024) dari teori Pierre Bourdieu menyoroti bagaimana sistem pendidikan tidak netral, melainkan turut mereproduksi struktur sosial yang timpang. Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan bukan sekadar alat mobilitas sosial, tetapi juga sarana mempertahankan dominasi kelompok elite. Ketimpangan yang ada dalam masyarakat terus berulang karena sekolah lebih menguntungkan mereka yang sudah memiliki sumber daya sosial dan kultural sejak awal.

Konsep utama dari Bourdieu meliputi habitus, yaitu pola pikir, sikap, dan tindakan yang terbentuk dari pengalaman hidup seseorang sejak kecil dalam lingkungan sosialnya. Habitus ini sangat memengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia pendidikan. Selain itu, terdapat tiga bentuk modal atau kapital: kapital ekonomi (kekayaan materi), kapital kultural (pengetahuan, gaya bicara, gelar pendidikan), dan kapital sosial (jaringan, koneksi). Ketiga modal ini saling berkaitan dan diwariskan antar generasi, sehingga memperbesar peluang kelompok elite untuk terus mempertahankan posisinya.

Pendidikan, menurut Bourdieu, cenderung mengakomodasi habitus dan kapital kultural kelas menengah dan atas, sehingga menciptakan kesan bahwa keberhasilan akademik murni berdasarkan kemampuan pribadi, padahal sebenarnya sudah dimodali sejak awal. Akibatnya, siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah seringkali dianggap kurang mampu atau gagal, padahal mereka berangkat dari posisi yang jauh lebih tidak menguntungkan. Dengan cara ini, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi arena di mana ketimpangan sosial terus direproduksi secara halus dan sistematis.



Ideologi dan Aparatus Negara

Pahabol (2024) menulis mengenai Louis Althusser, seorang filsuf Marxis yang mengembangkan teori mengenai *Ideological State Apparatus* (ISA) untuk menjelaskan bagaimana negara mempertahankan kekuasaan kelas dominan tidak hanya melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol ideologis. Dalam pandangan Althusser, lembaga-lembaga seperti keluarga, agama, media, dan terutama pendidikan, berfungsi sebagai alat negara untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi yang menguntungkan kelas penguasa. Dengan cara ini, dominasi kelas tidak hanya dipertahankan secara paksa, tetapi juga lewat kesadaran yang dibentuk secara halus.

Pendidikan menurut Althusser adalah ISA yang paling kuat, karena melalui sekolah, individu diajarkan untuk menerima tatanan sosial yang ada sebagai sesuatu yang wajar dan pantas. Sekolah menyisipkan nilai-nilai seperti disiplin, hierarki, ketaatan, dan kerja keras yang mana semua ini mendukung struktur kapitalisme. Murid dilatih bukan hanya untuk menjadi pekerja terampil, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang patuh dan tidak mempertanyakan sistem. Inilah cara ideologi kelas dominan direproduksi secara masif dan sistematis.

Lebih jauh, sistem pendidikan juga menyembunyikan ideologi dominan di balik klaim objektivitas dan *meritokrasi*. Sekolah tampak netral dan adil, padahal secara tersembunyi ia memperkuat struktur sosial yang timpang. Mereka yang berhasil dianggap layak karena kerja keras, sementara yang gagal dianggap kurang usaha dan tanpa menyadari bahwa sistem sejak awal sudah berpihak pada kelompok tertentu. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tempat mencetak tenaga kerja, tetapi juga arena ideologis untuk memastikan keberlangsungan dominasi kelas.

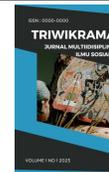
Mismatch Keterampilan dan Overeducation

Teori *mismatch* menurut Ginting (2024) keterampilan dan *overeducation* menjelaskan fenomena di mana tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki lulusan tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja. *Mismatch* terjadi ketika lulusan bekerja di posisi yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan atau keahlian yang mereka miliki, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia. *Overeducation* adalah bentuk spesifik dari *mismatch*, di mana individu memiliki pendidikan lebih tinggi daripada yang dibutuhkan oleh pekerjaannya, yang berujung pada rendahnya produktivitas dan kepuasan kerja.

Di Indonesia, fenomena ini semakin nyata terutama pada generasi muda atau lulusan baru, termasuk Generasi Z. Banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan praktis atau *soft skills* yang sesuai dengan kebutuhan industri, akibat kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan dinamika dunia kerja. Akibatnya, meskipun angka partisipasi pendidikan meningkat, banyak lulusan tetap mengalami pengangguran atau bekerja di sektor informal. Hal ini menimbulkan paradoks mengenai pendidikan yang seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial justru tidak menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak dan sesuai kompetensi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Jenis ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang kompleks seperti ketimpangan pendidikan dan tantangan kerja. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur variabel secara kuantitatif, tetapi lebih pada pemaknaan sosial terhadap data dan fenomena yang terjadi.



Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif yang berfokus pada bagaimana Generasi Z secara subjektif memahami, merasakan, dan memberi makna pada pengalaman mereka terkait pendidikan sebagai alat mobilitas sosial, ketimpangan akses pendidikan, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki gelar sarjana.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menangkap pengalaman subjektif secara mendalam atau narasi pribadi, observasi partisipatif, dan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data yang dilakukan peneliti dengan analisis kritis (*critical discourse analysis*), reduksi fenomenologis dan analisis tematik fenomenologis diterapkan untuk menanggukuhkan prasangka peneliti (*epoche*) dan memahami esensi pengalaman subjektif Generasi Z terkait ketimpangan pendidikan dan tantangan kerja, menangkap makna personal tanpa asumsi teoritis awal. Analisis tematik fenomenologis kemudian mengidentifikasi tema-tema utama dari narasi partisipan, seperti kekecewaan terhadap ijazah atau preferensi kerja fleksibel, untuk merangkum esensi kolektif pengalaman mereka, yang diintegrasikan dengan interpretasi kritis untuk menghubungkan pengalaman individu dengan struktur sosial yang lebih luas.

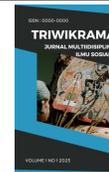
PEMBAHASAN

Secara normatif, pendidikan diposisikan sebagai instrumen utama mobilitas sosial dalam masyarakat modern. Melalui sistem pendidikan formal, individu dari berbagai latar belakang diharapkan memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Pemikiran ini berakar dari pendekatan fungsionalisme yang melihat pendidikan sebagai institusi *meritokratis* yaitu tempat di mana siapa pun yang berprestasi dapat sukses, terlepas dari asal-usul sosialnya. Pendidikan dalam teori Pakpahan (2022) diyakini menciptakan arena netral yang memungkinkan proses seleksi berdasarkan kemampuan dan kompetensi objektif.

Namun, dalam interpretasinya di Indonesia, keyakinan terhadap netralitas sistem pendidikan ini menghadapi tantangan besar. Dalam praktiknya, pendidikan tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh struktur sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga kaya atau menengah-atas umumnya memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas sejak dini di mulai dari pendidikan anak usia dini yang mahal, sekolah swasta unggulan, hingga les privat dan bimbingan belajar. Hal ini memberi mereka keunggulan modal budaya dan simbolik, sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali terkendala dalam mengakses pendidikan berkualitas, tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena kurangnya eksposur, bimbingan, dan infrastruktur pendukung.

Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembebasan dan mobilitas justru berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kelas sosial. Ketimpangan awal yang dibawa oleh latar belakang keluarga tidak hanya direproduksi tetapi diperkuat oleh sistem pendidikan itu sendiri. Maka muncul paradoks dalam perspektif peneliti yang mana pendidikan yang dijanjikan sebagai jembatan menuju perubahan sosial justru berperan sebagai gerbang yang menjaga status *quo*. Mobilitas sosial yang ideal hanya menjadi kemungkinan bagi segelintir orang yang sudah memiliki modal sosial, ekonomi, dan budaya sejak awal, sementara sebagian besar lainnya tertahan dalam sirkuit kemiskinan struktural.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang strategis yang sering dijadikan tolak ukur keberhasilan mobilitas sosial di era modern. Namun di Indonesia, akses terhadap jenjang ini tidak merata dan cenderung mencerminkan struktur sosial-ekonomi yang timpang. Mahalnya biaya kuliah, terbatasnya ketersediaan perguruan tinggi berkualitas di daerah, serta sistem seleksi masuk yang kompetitif dan sering kali tidak inklusif menjadi penghalang utama bagi



kelompok miskin atau marjinal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif seperti program KIP Kuliah, kendala non-struktural seperti kurangnya informasi, hambatan kultural, dan keterbatasan infrastruktur tetap menyulitkan akses ke pendidikan tinggi bagi banyak kelompok rentan.

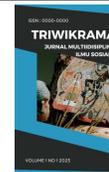
Secara geografis, distribusi perguruan tinggi unggulan masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan kota-kota besar. Hal ini membuat siswa dari daerah tertinggal harus menghadapi tantangan ganda yaitu selain bersaing secara akademik, mereka juga harus mengatasi kendala biaya hidup dan adaptasi sosial-budaya di lingkungan baru. Di sisi lain, mereka yang tinggal di kota besar cenderung lebih siap karena sejak awal telah terpapar pada lingkungan belajar yang lebih mendukung, mulai dari fasilitas hingga jaringan sosial. Disparitas ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukan lagi hanya soal kemampuan intelektual, tetapi juga soal *privilege* struktural.

Kesenjangan ini menciptakan eksklusivitas pendidikan tinggi, di mana hanya kelompok tertentu yang mampu mengakses dan memanfaatkannya secara maksimal. Bahkan di antara mereka yang berhasil menembus jenjang tersebut, tidak semua mendapat kualitas pendidikan yang setara karena kualitas antar kampus pun sangat bervariasi. Dengan demikian, ketimpangan akses ini berkontribusi langsung terhadap stagnasi sosial-ekonomi sebagian besar masyarakat. Dalam jangka panjang, jika tidak diatasi, fenomena ini akan melanggengkan stratifikasi sosial dan membatasi peluang mobilitas antar generasi, memperparah ketimpangan yang sudah mengakar sejak jenjang pendidikan dasar.

Ketimpangan akses terhadap pendidikan, khususnya di jenjang tinggi, memiliki konsekuensi serius terhadap pola mobilitas sosial di Indonesia. Menurut Ramadhan (2025), mereka yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi sering kali terjebak dalam pekerjaan informal, berpenghasilan rendah, dan minim perlindungan sosial. Padahal, sebagian besar pekerjaan berkualitas yang menawarkan gaji layak, jaminan sosial, dan jenjang karier yang membutuhkan minimal ijazah sarjana. Dengan demikian, mereka yang tidak berhasil menembus jenjang ini nyaris tidak memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup secara signifikan. Implikasi ini menjadikan pendidikan bukan sebagai alat pemerataan, melainkan sebagai pemisah sosial yang mempertegas batas antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses.

Selain memperbesar ketimpangan antar individu, ketimpangan pendidikan juga menciptakan ketimpangan antarwilayah. Wilayah-wilayah yang memiliki konsentrasi lembaga pendidikan tinggi berkualitas seperti Jakarta, Yogyakarta, atau Malang juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial, sementara daerah-daerah dengan akses pendidikan terbatas cenderung tertinggal secara pembangunan. Akibatnya, urbanisasi meningkat, ketimpangan regional memburuk, dan distribusi talenta nasional menjadi tidak merata. Hal ini juga berdampak pada efektivitas pembangunan nasional secara keseluruhan, karena banyak potensi generasi muda dari daerah yang tidak berkembang maksimal akibat keterbatasan akses pendidikan.

Yang lebih mengkhawatirkan, ketimpangan ini berdampak pada psikososial generasi muda. Menurut Astawa (2024), mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah merasa pendidikan tidak relevan karena melihat banyak lulusan sarjana pun tetap menganggur. Di sisi lain, mereka yang berhasil mengakses pendidikan tinggi sering mengalami beban ekspektasi tinggi namun realita kerja yang tak sesuai. Kondisi ini melahirkan krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan melemahkan semangat kolektif untuk menggunakan pendidikan sebagai jalan perubahan. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, akan terbentuk masyarakat yang



terfragmentasi dan apatis, di mana pendidikan tidak lagi dilihat sebagai harapan, tetapi sebagai simbol ketidakadilan melankolis.

Ketimpangan akses pendidikan tidak hanya berdampak pada jenjang dan kualitas pendidikan yang dapat diraih oleh Generasi Z, tetapi juga membentuk lanskap kemampuan, orientasi kerja, dan peluang ekonomi mereka. Generasi Z yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, pelatihan keterampilan yang relevan, serta jaringan sosial yang penting dalam dunia kerja. Ketimpangan ini membuat mereka kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin menuntut kualifikasi tinggi dan keterampilan spesifik, terutama di sektor teknologi dan ekonomi digital. Akibatnya, sebagian besar dari mereka terjebak dalam pekerjaan informal atau berpendapatan rendah meskipun sudah menyelesaikan pendidikan formal.

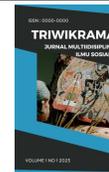
Lebih dari sekedar ketidakadilan secara struktural, ketimpangan ini menciptakan frustrasi sosial di kalangan Generasi Z. Banyak dari mereka merasa bahwa sistem pendidikan telah gagal memberikan hasil yang dijanjikan, yakni pekerjaan yang layak dan mobilitas sosial. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi menjadi simbol harapan, melainkan pengingat akan keterbatasan peluang. Anak muda dari wilayah terpencil, misalnya, melihat bagaimana akses terhadap program pengembangan *skill* seperti *coding*, bahasa asing, atau kewirausahaan digital jauh lebih mudah didapatkan oleh rekan mereka di kota besar. Ketimpangan ini akhirnya memperkuat jurang digital dan sosial yang menjauhkan mereka dari potensi kemajuan kolektif.

Dalam teori Anwar (2025) generasi Z tumbuh dalam ekosistem digital yang penuh dengan narasi tentang kreativitas, kerja fleksibel, dan peluang sukses di usia muda. Mereka menginginkan pekerjaan yang tidak hanya mencukupi secara materi, tetapi juga bermakna dan sejalan dengan nilai-nilai pribadi seperti keberlanjutan, inklusivitas, dan keseimbangan hidup. Harapan ini diperkuat oleh representasi media sosial dan tokoh-tokoh muda sukses yang menjadi panutan mereka. Di banyak kasus, ekspektasi ini membentuk idealisme yang kuat terhadap karier. Ekspektasi untuk berdikari dalam setiap pekerjaan yang diinginkan juga memperkeruh keadaan dikarenakan tidak sesuai dengan realitas kerja di lapangan.

Namun, ketika dihadapkan dengan realitas lapangan kerja di Indonesia, banyak dari mereka mengalami disonansi. Dunia kerja nasional masih sangat didominasi oleh struktur birokratis, jam kerja tetap, sistem hierarki kaku, dan minim ruang ekspresi. Sektor informal mendominasi penyerapan tenaga kerja, sementara sektor formal yang bergaji layak sangat terbatas dan kompetitif. Akibatnya, harapan-harapan Generasi Z tentang dunia kerja yang dinamis, otonom, dan kolaboratif seringkali tidak terpenuhi, menciptakan kekecewaan dan bahkan penolakan terhadap pekerjaan konvensional. Fenomena ini turut menyumbang pada tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan muda, meskipun secara pendidikan mereka tergolong layak.

Dalam teori Basri (2024) salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh Generasi Z di Indonesia adalah ketimpangan antara capaian akademik (ijazah) dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Banyak lulusan sarjana yang memiliki titel formal, tetapi minim kemampuan praktis, keterampilan lunak (*soft skills*), dan pengalaman kerja yang relevan. Hal ini merupakan akibat langsung dari sistem pendidikan yang terlalu fokus pada pengetahuan teoritis, ujian tulis, dan akumulasi nilai akademik, daripada pada pengembangan kemampuan adaptif dan praktikal seperti komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah, serta kecakapan digital. Ketika masuk dunia kerja, banyak lulusan tidak mampu memenuhi ekspektasi perusahaan yang menuntut kesiapan langsung dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks.

Fenomena ini menciptakan apa yang dikenal sebagai *overeducation but underqualified* yang berarti lulusan memiliki gelar, tetapi tidak memiliki kompetensi teknis atau emosional



yang dibutuhkan. Perusahaan pun menjadi lebih selektif, bahkan cenderung lebih mempercayai pengalaman kerja dan portofolio nyata dibandingkan hanya mengandalkan ijazah akademik. Hal ini semakin memperkuat kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri, serta menciptakan kondisi di mana ijazah tak lagi menjamin pekerjaan. Di tengah era digital, banyak perusahaan bahkan lebih memilih individu yang belajar secara otodidak dan menunjukkan kemampuan melalui proyek konkret daripada lulusan formal dari universitas.

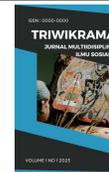
Generasi Z menunjukkan perubahan signifikan dalam nilai-nilai dan preferensi kerja dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih menghargai fleksibilitas waktu dan tempat kerja, serta cenderung menolak sistem kerja yang terlalu kaku dan monoton. Konsep *work-life balance* atau bahkan *work-life integration* menjadi sangat penting bagi mereka, dan mereka lebih tertarik pada pekerjaan yang memberi ruang untuk aktualisasi diri, belajar hal baru, dan memiliki dampak sosial. Selain itu, pekerjaan yang bersifat digital, seperti *content creator*, *digital marketing*, *freelancer*, atau *startup founder*, menjadi daya tarik karena dianggap menawarkan kebebasan dan kendali atas waktu dan proses kerja.

Nilai-nilai ini menurut Yudhanto (2024) bertumbuh dalam ekosistem teknologi yang mereka alami sejak kecil. Generasi Z lahir dalam era internet dan media sosial, di mana akses informasi dan peluang kerja bersifat global dan terbuka. Mereka terbiasa belajar secara mandiri melalui platform daring, berjejaring lintas batas, dan menilai kesuksesan bukan hanya dari jabatan atau gaji, tetapi juga dari kepuasan personal dan reputasi digital. Maka tidak mengherankan jika banyak dari mereka yang lebih memilih menjadi *freelancer* atau memulai usaha sendiri daripada mengikuti jalur kerja korporat konvensional. Ini mencerminkan adanya transformasi nilai-nilai kerja yang membutuhkan respons adaptif dari dunia industri dan kebijakan ketenagakerjaan.

Sistem kerja konvensional di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hierarkis, jam kerja tetap, dan pola birokrasi yang kaku. Model kerja ini dirancang pada era industri yang menuntut efisiensi dan kepatuhan, bukan kreativitas atau inovasi. Sayangnya, model tersebut tidak lagi sesuai dengan karakteristik Generasi Z yang menginginkan ruang ekspresi, fleksibilitas, dan otonomi. Dalam banyak kasus, perusahaan masih menilai karyawan berdasarkan lamanya bekerja (senioritas), kehadiran fisik, dan kepatuhan prosedural, bukan pada produktivitas atau hasil kerja nyata. Hal ini menimbulkan ketegangan antara harapan generasi muda dengan ekspektasi dunia kerja.

Akibat ketidaksesuaian ini, banyak anak muda yang cepat merasa jenuh, tidak berkembang, atau bahkan keluar dari pekerjaan formal meskipun secara materi mencukupi. Di sisi lain, perusahaan merasa kesulitan mempertahankan talenta muda karena tidak memahami nilai-nilai baru yang mereka bawa. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa transformasi budaya kerja, dunia industri akan terus mengalami friksi dengan generasi muda. Ketidaksesuaian ini juga memperlambat inovasi, karena bakat-bakat muda enggan masuk atau bertahan dalam struktur kerja yang dianggap usang dan membatasi kreativitas.

Mismatch keterampilan terjadi ketika jenis keterampilan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Fenomena ini sangat umum di Indonesia, terutama karena sistem pendidikan tidak dirancang secara responsif terhadap dinamika kebutuhan industri. Kurikulum yang terlalu kaku, minimnya keterlibatan dunia industri dalam penyusunan materi ajar, serta kurangnya pelatihan praktik di lapangan membuat lulusan tidak siap menghadapi tantangan nyata dalam dunia kerja. Banyak perusahaan melaporkan bahwa meskipun ada ribuan pelamar kerja, hanya sedikit yang benar-benar memenuhi kualifikasi teknis yang dibutuhkan.



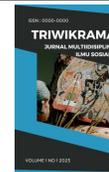
Mismatch ini tidak hanya menyulitkan pencari kerja, tetapi juga merugikan perusahaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pelatihan internal, sementara generasi muda harus menempuh pelatihan non-formal (kursus, *bootcamp*, pelatihan daring) untuk mengisi kesenjangan kompetensi. Lebih dari itu, *mismatch* keterampilan juga menciptakan ketidakstabilan sosial, karena banyak lulusan merasa tertipu oleh sistem pendidikan yang tidak mampu menjamin masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat disonansi antara dunia akademik dan dunia kerja, serta menegaskan perlunya reformasi sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil pasar kerja.

Paradoks utama yang muncul dari temuan dalam konteks pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara harapan terhadap fungsi pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dengan kenyataan bahwa pendidikan justru sering memperkuat ketimpangan sosial. Secara teoritis, pendidikan dipandang sebagai penyeimbang yang menjanjikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Namun, dalam realitasnya, akses terhadap pendidikan berkualitas sangat bergantung pada latar belakang sosial ekonomi seseorang.

Lebih lanjut, ketika Generasi Z berhasil menempuh pendidikan tinggi pun, mereka tidak serta-merta memperoleh pekerjaan yang menjamin stabilitas ekonomi. Banyak lulusan sarjana yang menganggur atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang akademisnya. Sementara itu, sektor industri sering kali mengeluhkan kekurangan tenaga kerja yang kompeten. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menyambungkan *output* pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja. Kontradiksi ini memperkuat anggapan bahwa sistem pendidikan kita lebih bersifat simbolik yaitu memberi gelar, tetapi tidak memberi daya guna yang konkret. Paradoks ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga menantang asumsi fundamental tentang fungsi pendidikan dalam pembangunan sosial.

Dalam permasalahan ini, kebijakan pendidikan nasional tampaknya gagal mengatasi ketimpangan struktural yang mendasari distribusi sumber daya pendidikan. Alih-alih mereformasi sistem untuk memastikan akses yang lebih merata, pemerintah cenderung mempertahankan status *quo* yang memprioritaskan institusi pendidikan di wilayah urban dan kelompok sosial-ekonomi tertentu. Alokasi anggaran yang tidak proporsional, kurangnya investasi pada pendidikan di daerah tertinggal, dan ketidakmampuan untuk merevisi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan industri menunjukkan kurangnya komitmen terhadap transformasi sistemik. Selain itu, fokus pada indikator kuantitatif, seperti tingkat kelulusan, mengabaikan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan saat ini tidak hanya gagal memenuhi janji mobilitas sosial, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi pada reproduksi ketimpangan sosial, memperkuat paradoks yang menjadi inti permasalahan ini.

Dari perspektif teori kritis, khususnya dalam tradisi Marxis, sistem pendidikan tidak netral, melainkan merupakan alat ideologis negara dan kelas dominan untuk mereproduksi tatanan sosial yang ada. Para pemikir seperti Louis Althusser dan Pierre Bourdieu mengkritik pendidikan sebagai mekanisme reproduksi kelas, bukan hanya karena ketimpangan akses, tetapi juga karena nilai-nilai, norma, dan struktur kurikulum yang melegitimasi dominasi kelas atas. Dalam konteks Indonesia, kurikulum nasional sering kali lebih menekankan kedisiplinan, kepatuhan, dan pengetahuan formal, dibandingkan kreativitas, pemikiran kritis, atau keterampilan praktis. Hal ini selaras dengan kebutuhan sistem kapitalis yang membutuhkan tenaga kerja yang taat dan mudah dikontrol, bukan tenaga kerja yang otonom dan kritis terhadap struktur sosial.



Lebih lanjut, teori reproduksi sosial menyoroiti bagaimana pendidikan tidak hanya mempertahankan ketimpangan, tetapi juga membuatnya tampak wajar dan alami. Lulusan dari keluarga kaya yang sukses dianggap berprestasi, sementara mereka yang tertinggal dianggap kurang usaha atau tidak cerdas, padahal latar belakang struktural mereka sangat berbeda. Sistem seleksi berdasarkan nilai ujian, akreditasi sekolah, dan ranking kampus memperkuat narasi *meritokrasi* palsu, di mana seolah-olah semua individu memiliki peluang yang sama. Dengan cara ini, pendidikan menjadi instrumen dominasi simbolik dengan melanggengkan ketimpangan dalam wujud yang disamarkan sebagai keadilan.

Salah satu kritik mendasar terhadap sistem pendidikan di Indonesia (dan di banyak negara berkembang) adalah kecenderungannya untuk menilai keberhasilan peserta didik berdasarkan sertifikasi atau *credential* formal, seperti ijazah, gelar, atau akreditasi, daripada keterampilan nyata yang dapat diaplikasikan di dunia kerja. Kecenderungan ini tercermin dalam budaya akademik yang terlalu fokus pada capaian nilai, ujian tulis, dan akumulasi indeks prestasi kumulatif (IPK), sementara aspek keterampilan praktis dan proyek nyata justru dikesampingkan. Hal ini menyebabkan lahirnya generasi lulusan yang secara administratif memenuhi syarat, tetapi secara fungsional kurang siap untuk menghadapi tantangan di dunia profesional yang sesungguhnya. Dalam konteks pasar kerja yang semakin dinamis dan berbasis keterampilan, hal ini menjadi hambatan besar.

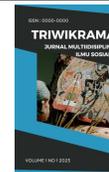
Lebih ironis lagi, *credential* yang diperoleh tidak selalu menunjukkan kualitas lulusan secara holistik. Banyak perusahaan saat ini mulai menyadari bahwa nilai akademik tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja di tempat kerja. Alhasil, mulai muncul tren seleksi berdasarkan portofolio, pengalaman magang, pelatihan independen, bahkan asesmen keterampilan digital seperti *coding* atau *design*. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai pasar terhadap *credential* formal mulai menurun, dan sistem pendidikan yang tidak segera beradaptasi akan semakin tertinggal. Ketergantungan pada sertifikasi juga memperkuat eksklusivitas pendidikan, karena hanya mereka yang mampu membayar institusi tertentu yang bisa mendapatkan gelar bergengsi, sementara yang lain terpinggirkan meskipun mungkin memiliki kemampuan yang lebih relevan. Ini menambah lapisan baru pada paradoks pendidikan yaitu semakin tinggi gelar, tidak selalu berarti semakin tinggi peluang kerja.

Kesulitan Generasi Z dalam mencari kerja meskipun berstatus sarjana merupakan cerminan dari kegagalan sistemik dalam sistem pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah ini melalui reformasi kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri, peningkatan investasi pada pendidikan vokasi, penciptaan lapangan kerja formal, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Namun, kebijakan yang ada saat ini cenderung parsial, kurang terkoordinasi, dan tidak cukup responsif terhadap dinamika pasar kerja dewasa ini. Pada akhirnya, Generasi Z tidak hanya kesulitan dalam menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan tetapi terjebak tirani struktural berkepanjangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan tinggi tidak hanya membatasi peluang ekonomi bagi generasi muda, tetapi juga memperdalam jurang sosial antar kelas dan antarwilayah. Generasi Z yang lahir dan tumbuh dalam era digital menghadapi tantangan ganda yaitu di satu sisi, mereka memiliki ekspektasi kerja yang dinamis dan fleksibel tetapi di sisi lain, dunia kerja Indonesia masih konservatif, birokratis, dan tidak adaptif terhadap perubahan nilai-nilai baru. Selain itu, *mismatch* keterampilan antara *output*



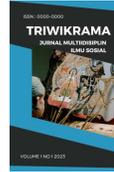
pendidikan dan kebutuhan industri memperparah situasi, menghasilkan lulusan yang *overeducated* namun *underqualified*. Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan krisis kepercayaan generasi muda terhadap pendidikan, melemahkan semangat mobilitas sosial, dan memperkuat fragmentasi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, kurikulum, dan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Saran

Untuk mengatasi paradoks pendidikan sebagai alat mobilitas sosial yang justru mereproduksi ketimpangan, diperlukan reformasi sistemik yang mencakup pembaruan kurikulum, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah juga perlu memperluas investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja. Selain itu, distribusi fasilitas pendidikan berkualitas perlu diperluas ke luar wilayah urban agar potensi generasi muda dari berbagai daerah dapat berkembang secara adil. Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Yang tak kalah penting, dibutuhkan kesadaran kritis dari masyarakat, khususnya Generasi Z, untuk memahami bahwa pendidikan adalah medan perjuangan sosial yang harus terus diperjuangkan agar benar-benar menjadi alat pembebasan, bukan alat pelanggeng ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2025). *Strategi Mengelola Generasi Z Di Tempat Kerja: Produktivitas, Komunikasi, Dan Pengembangan Karir*. Arus Pedia Creative.
- Astawa, I. P. M., Sumetri, N. W., & Wahyuni, L. M. (2024). *Kewirausahaan Teori, Niat, Dan Praktik Di Perguruan Tinggi*. Cv. Intelektual Manifes Media.
- Deni, H. A., Mm, C., Asiyah, S. A., Sopian, S. H., Waruwu, Y., Funco Tanipu, S. T., ... & Nugroho, C. A. (2024). *Pengantar Ilmu Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Ginting, C. Y., Elfindri, E., & Kamarni, N. (2024). "Qualification Mismatch Dan Dampaknya Terhadap Upah Pekerja Di Indonesia: Heckman Two Step Method". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 254-263.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hutabarat, D., & Pangaribuan, C. S. (2025). "Tinjauan Sosiologis Terhadap Kleptokrasi Sebagai Bentuk Lanjutan Oligarki Dalam Perspektif Marxian Di Indonesia". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(11), 51-60.
- Mesra, R. (2023). *Research & Development Dalam Pendidikan*.
- Muttaqin, M. F., Ahsani, E. L. F., & Wijayama, B. (2025). *Problematisasi Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi (Mengupas Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Karakter Dalam Pendidikan)*. Cahya Ghani Recovery.
- Nusantara, W. Z. S., Basri, H., & Rahayu, Y. (2024). "Optimalisasi Peran Gen Z Sebagai Bonus Demografi Dalam Mencapai Indonesia Emas". *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(4), 2034-2050.
- Pahabol, E. (2024). "Analisis Kritis Stigma Tentang Orang Papua Primitif Di Media". Doctoral Dissertation, Institut Agama Kristen Negeri Toraja.
- Pakpahan, B. A. S. (2022). *Budaya Organisasi, Manajemen Konflik, Keadilan Prosedural Dan Kepuasan Pada Pekerjaan*. Publica Indonesia Utama.
- Raharjo, S., Pertiwinigrum, A., Julia, M., Kumorotomo, W., Maksum, M., & Baiquni, M. (2024). *Pangan Berdaulat, Generasi Sehat, Bangsa Bermartabat*. Ugm Press.



Ramadhan, D., Qatrunnada, A. A., Aprilia, A., & Lukitoaji, B. D. (2025). “Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Angka Kasus Anak Putus Sekolah Di Indonesia”. *Educreativa: Jurnal Seputar Isu Dan Inovasi Pendidikan*, 1(1).

Yudhanto, Y. (2024). *Information Technology Business Startup 2.0: Ilmu Dasar Merintis Startup Berbasis Teknologi Informasi Untuk Pemula*. Elex Media Komputindo.